

**PARADOKS SURVEY DAN ELEKTABILITAS : QUO VADIS ANTARA HASIL JAJAK ELEKTABILITAS DAN HASIL EMPIRIS BEBERAPA PILKADA DI INDONESIA****Topan Setiawan<sup>1</sup>, Wahyuning Chumaeson<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Teknik Informatika, Universitas Boyolali

Email : [masetiawan111@gmail.com](mailto:masetiawan111@gmail.com)**ABSTRAK**

Kecenderungan arah politik konstituen umumnya memang diwakili dengan metode survey. Survey menjadi instrumen metodologis yang hingga kini dipakai untuk mencoba membaca hati massa dalam populasi yang besar. Survey terhadap sampel yang diambil dari populasi, secara metodologis masih dianggap representatif. Namun, fakta empiris bisa menampilkan realitas yang sama sekali berbeda apa yang diprediksikan oleh hasil jajak pendapat itu. Boleh jadi metode ini jika dihadapkan realitas paradoksal pada berbagai kasus rekrutmen kepala daerah menjadi metode yang gagal. Namun, kiranya patut dicurigai juga betapa kecenderungan arah politik manusia itu bersifat dinamis. Maka hasil kajian pada kurun waktu tertentu, bisa saja berbeda hasilnya dengan kajian pada waktu yang lain, dan bahkan hingga hari H kontestasi.

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data adalah data data yang di beritakan oleh media, sehubungan dengan hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia. Analisis dengan reduksi data, yakni memilih dan memilah raw material dari sumber data. Hasil analisis akan di deskripsikan dalam bentuk laporan naratif terstruktur. Luaran penelitian ini adalah naskah jurnal yang terpublikasi di jurnal Internal Prodi Ilmu Komunikasi.

Berkaca pada situasi pilkada 2018 yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada hal yang tidak cukup bisa diukur oleh metode survey yaitu faktor emosi publik. Dalam komunikasi massa, faktor emosional atau psikologis menjadi salahsatu hambatan dalam komunikasi massa. Sehingga pesan yang disampaikan tidak efektif atau dapat mempengaruhi preferensi politik. Dalam beberapa kasus di pilkada 2018, faktor emosi publik secara efektif dapat berubah drastis melalui pendekatan agama seperti yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta dan pengaruh tersebut berupaya dibawa ke Pilgub Jabar. Isu partai penista agama, pendukung penista agama dan gerakan 212 mempengaruhi psikologi publik yang sangat dominan. Hal ini mendorong terbentuknya silent majority. Mereka merasakan sesuatu yang dipendam tapi tidak terungkapkan. Proses pemilu dimaknai sebagai bagian dari momen menunjukkan identitas diri umat beragama. Demikian sentiment publik dibangun.

Faktor lainnya yang mempengaruhi psikologi atau emosi publik sehingga menimbulkan pergeseran terhadap preferensi politik adalah faktor moral dan etika. Isu korupsi yang menerpa Ganjar Pranowo menjelang Pilgub Jateng berpengaruh pada preferensi politik masyarakat. Sehingga Sudirman Said dipandang sebagai sosok yang bersih dari isu korupsi. Dengan demikian dapat disimpulkan, hal yang dinamis dapat terus berubah dan sulit untuk diukur yakni faktor emosi publik.

*Kata kunci* : pilkada, survey, paradoks, elektabilitas

## PENDAHULUAN

Angka elektabilitas menjadi semacam mantra sakti yang sanggup mengantarkan seorang *public figure* menggapai segala ambisi politiknya. Pemilik angka keterpilihan (elektabilitas) tinggi akan menjelma menjadi selebritis politik dalam sekejap. Seakan tidak perlu lagi diuji kemampuannya. Seorang politisi yang memiliki elektabilitas yang tinggi dipandang sudah separuh lebih menguasai ilmu politik. Dipinang partai politik, didekati para “pemodal” yang sanggup membiayainya dalam kompetisi politik.

Seorang politisi yang bertarung dengan modal angka elektabilitas tinggi hampir dipastikan bisa memenangkan pertarungan perebutan kekuasaan. Hembusan informasi oleh media akan mempengaruhi benak publik bahwa politisi dengan elektabilitas tinggi makin meyakinkan publik akan memenangkan pertarungan politik. Sekaligus mempengaruhi psikologis lawannya menjadi putus asa dan mengendurkan semangat perlawanan terhadap pemilik elektabilitas tinggi berdasarkan hasil survey.

Kecenderungan arah politik konstituen umumnya memang dijajaki dengan metode survey. Survey menjadi instrumen metodologis yang hingga kini dipakai untuk mencoba membaca hati massa dalam populasi yang besar. Survey terhadap sampel yang diambil dari populasi, secara metodologis masih dianggap representatif. Namun, fakta empiris bisa menampilkan realitas yang sama sekali berbeda apa yang diprediksikan oleh hasil jajak pendapat itu. Boleh jadi metode ini jika dihadapkan realitas paradoksal pada berbagai kasus rekrutmen kepala daerah menjadi metode yang gagal. Namun, kiranya patut dicurigai juga betapa kecenderungan arah politik manusia itu bersifat dinamis. Maka hasil kajian pada kurun waktu tertentu, bisa saja berbeda hasilnya dengan kajian pada waktu yang lain, dan bahkan hingga hari H kontestasi.

Mendapatkan gambaran mengenai kecenderungan arah politik konstituen pada kasus pilkada yang hasil empirisnya berbeda dengan hasil survey pra pemilihan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut “ Bagaimana gambaran mengenai kecenderungan arah politik konstituen pada kasus pilkada yang hasil empirisnya berbeda dengan hasil survey pra pemilihan ‘

## KERANGKA TEORETIK

### A. Kepribadian dalam Psikologi Politik

Politik sebenarnya telah dimulai dilakukan oleh perilaku masyarakat. Tidak hanya dalam kelompok masyarakat politik dilakukan, tetapi oleh anggota masyarakat secara menyeluruh dalam sebuah negara. Hal yang utama adalah politik dilakukan oleh manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang memberikan pilihan terhadap pemimpin yang dia sukai dan memenuhi kriteria yang diinginkan ataupun yang dia tidak sukai (Elms, 2000).

Setiap individu memiliki personality yang berbedabeda. Tema-tema personality sudah sering didiskusikan dalam seminar ataupun workshop dikalangan tradisi ilmiah perguruan tinggi ataupun oleh para politikus. Kualitas kepribadian politikus yang baik dapat membantu untuk membangun bangsa yang baik. Sebagian besar penelitian tentang kepribadian politik berisi tentang sesuatu yang dipandang sebelah mata yaitu saling curiga mencurigai antara satu dengan yang lain. Kecurigaan tersebut berkaitan semboyan dalam pelaku politik tidak ada lawan dan teman yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Dalam benak pikiran politikus yang ada adalah “saya dapat apa, dan kamu dapat apa.” Lasswell’s menjelaskan dalam bukunya *Politics: Who Gets What,, When and, How* (1936), perilaku politik adalah siapa mendapat apa, dan bagaimana cara mendapatkannya. Memahami konsep personality

paling tidak dapat dilacak melalui dua hal yaitu pada sisi sejarah dan trend kekinian. Hal tersebut agar tidak mengurangi makna kepribadian secara spesifik objektif untuk mengukur kepribadian secara teliti. Dalam konteks sejarah personality lebih eksis dengan permasalahan moral, religiusitas, dan norma-norma yang ada yang melekat pada seseorang dan disepakati oleh masyarakat setempat. Konsep kepribadian dalam masa kekinian sulit untuk dijadikan konsep yang menetap. Masalahnya begitu luas teori kepribadian dalam bidang tradisi psikologi klinis. Ditambah lagi meningkatnya popularitas pembelajaran teori-teori ilmu sosial, hal yang demikian menghambat perkembangan konstruk analisis trans-situasional ilmu kepribadian (Erisen, 2012).

## B. Elektabilitas

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer. Sedangkan popularitas adalah tingkat ketekanan di mata public. Meskipun populer belum tentu layak dipilih. Sebaliknya meskipun punya elektabilitas sehingga layak dipilih tapi karena tidak diketahui publik, maka rakyat tidak memilih.

Untuk meningkatkan elektabilitas maka sangat tergantung pada teknik kampanye yang dipergunakan. Dalam masyarakat yang belum berkembang, kecocokan profesi tidak menjadi persoalan. Yang perlu diingat, tidak semua kampanye berhasil meningkatkan elektabilitas. Ada kampanye yang menyentuh, ada kampanye yang tidak menyentuh kepentingan rakyat. Sementara itu ada kampanye yang berkedok sebagai survei, dengan tujuan untuk mempengaruhi orang yang sulit membuat keputusan dan sekaligus mematahkan semangat lawan. Elektabilitas dijadikan tolok ukur utama suatu keberhasilan, orang atau instansi yang berkualitas tetapi tidak berada dalam lingkaran kekuasaan pun menjadi tersisih. Sebaliknya, mereka yang berada dalam posisi pusat perhatian akan menjadi rebutan. Kondisi ini disuburkan oleh kondisi dan karakteristik masyarakat Indonesia yang sebagian besar belum sadar politik dan berpendidikan rendah serta rendahnya partisipasi politik masyarakat. Ada beberapa indikator utama yang membuat seorang figur dikatakan populer, antara lain, sedang menduduki posisi strategis, sering muncul di berbagai media massa, dan citranya positif dengan karakter dan sikap yang kuat.

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik atau utuh. (Moleong, 2010:4). Menggunakan metode deskriptif berarti peneliti menganalisa data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2010:11).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Pada metode observasi, langsung mengamati subjek dan objek. Dengan metode ini dimungkinkan melihat perilaku serta kejadian yang sebenarnya. (Kriyantono, 2009:98). Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang beraitan dengan penelitian baik dari buku, jurnal, surat kabar, majalah, foto, rekaman, video, ataupun

internet.

Data yang diperoleh dari metode dokumentasi yang diharapkan dapat mendukung dalam proses analisis data. Studi pustaka yang digunakan adalah studi berkenaan dengan komunikasi massa dan media elektronik. Peneliti menggunakan analisis interactive model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Teknik analisis ini memiliki tiga komponen yaitu:

- Reduksi data, dimaksudkan bahwa dalam tahap ini sebagai proses pemilihan data dan informasi yang telah didapatkan selama melakukan penelitian di lapangan.
- Penyajian data, merupakan sebuah proses yang menyajikan data penelitian dalam sebuah kesatuan yaitu hasil akhir penelitian melalui kalimat yang disusun secara sistematis dan logis sehingga mudah dipahami.
- Kesimpulan, merupakan implikasi dari prinsip induktif penelitian. Selain itu, kesimpulan divervikasi selama penelitian berlangsung guna memperoleh kebenaran tentang sebuah data dan informasi (Pawito, 2007).

Teknik triangulasi digunakan sebagai metode keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2010). Pada penelitian ini, menggunakan triangulasi sumber. Patton mengungkapkan bahwa teknik triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan pengambilan data menggunakan wawancara yang dimana sumber berperan aktif dalam memberikan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini. Data akan dibandingkan sesuai dengan apa yang dikatakan informan baik menurut pandangan informan dan juga situasi yang terjadi.

## PEMBAHASAN

### Kasus Kasus Paradoksial Pemilukada Di Indonesia

#### *Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018*

Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara dari sejumlah pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk Pilkada Jawa Barat. Berdasarkan data KPU, untuk Pilkada Jawa Barat: Jumlah pemilih: 31,73 juta pemilih Jumlah surat suara sah: 21.979.995 suara Jumlah surat suara tidak sah: 744.338 suara Dari hasil rekapitulasi KPU, pasangan Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan suara 7.226.254 suara (32,88 persen). Posisi kedua ditempati pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu dengan 6.317.465 (28,74 suara). Sementara, pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi di posisi ketiga dengan perolehan 5.663.198 suara (25,77 persen), dan terakhir pasangan tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan dengan 2.773.078 suara (12,62 persen).



Infografis Hasil Pilkada Jawa Barat 2018

Sumber : Kompas.com

Beberapa Lembaga survey merilis bahwa pasangan Sudrajat-Syaikhu diprediksi hanya akan meraih suara dibawah 10 persen, ternyata hasil akhirnya mengejutkan. Pasangan Sudrajat-Syaikhu berhasil finish dengan hasil akhir meraih 28 persen suara ( Nurhakim,2022). Inilah yang menampilkan realitas anomali dalam perhelatan politik. Lembaga survei Ilma Research and Consulting merilis hasil survei terkait dengan pilgub Jawa Barat 2018, yang dilakukan pada 15-20 Mei. Hasilnya menunjukkan tiga calon Gubernur Jawa Barat bersaing ketat dengan selisih elektabilitas yang sangat tipis.

Ketiga paslon (pasangan calon) yang elektabilitasnya bersaing ketat adalah Ridwan Kamil dengan elektabilitas tertinggi sebesar 28,63 persen, unggul tipis dari Deddy Mizwar dengan elektabilitas 27,88 persen, kemudian TB Hasanuddin meraih 19,50 persen ( Okan Darsyah, Direktur Eksekutif Ilma Research and Consulting). Sedangkan calon wakil gubernur yang paling dikenal masyarakat adalah Dedi Mulyadi 71,6 persen, kemudian Uu Ruzhanul Ulum 42,8 persen, Ahmad Syaikhu 36,4 persen, dan Anton Charliyan 33,1 persen. Survei yang digelar Ilma Research and Consulting ini mengambil populasi masyarakat Jawa Barat yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah saat survei dilaksanakan. Survei dilaksanakan di 80 desa/kelurahan, yang meliputi 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, dengan metode penarikan sampel multistage random sampling. Sampel berjumlah 800 responden dan margin of error lebih-kurang 3,46 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

### ***Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018***

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Ganjar Pranowo dan Taj Yasin, memenangi Pilkada Jawa Tengah 2018. Berdasarkan laporan hasil rekapitulasi suara dan penetapan hasil penghitungan suara yang diterima Kompas.com, Ganjar-Yasin memperoleh persentase 58,78 persen dengan perolehan 10.362.694 suara. Sementara itu, pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah memperoleh persentase 41,22 persen dengan perolehan 7.267.993 suara. Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyampaikan, hingga Minggu (8/7/2018), pukul 17.00 WIB, 111 daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah menyelesaikan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pada Pilkada Serentak 2018. Adapun rinciannya, dari 154 kabupaten dan kota, baru 105 daerah yang telah melakukan rekapitulasi suara dan penetapan hasil pemilihan.



Infografis Hasil Pilkada Jawa Tengah 2018

Sumber : Kompas.com

Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara dari sejumlah pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk Pilkada Jawa Tengah. Berdasarkan data KPU, untuk Pilkada Jawa Tengah: Jumlah pemilih: 27.068.125 pemilih Jumlah surat suara sah: 17.630.687 suara Jumlah surat suara tidak sah: 778.805 suara Dari hasil rekapitulasi KPU, pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen Zubair dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan suara 10.362.694 suara (58,78 persen).

PDI Perjuangan sudah memprediksi kemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin pada Pemilihan Gubernur 2018. Hal itu diyakinkan dengan survei internal partai yang menunjukkan elektabilitas Ganjar-Yasin yang terus naik. Survei harian dilakukan tim DPD PDIP Jawa Tengah. Dari hasil survei tanggal 19 dan tanggal 20 Juni 2018 elektabilitas Ganjar-Yasin naik, sedangkan pasangan Sudirman-Ida tidak berubah. Metodologi survei yang dilakukan adalah dengan teknik multistage random sampling dengan 700 responden. Penarikan sample dilakukan secara acak dan proporsional. Margin of error sebesar  $\pm 3,8$  persen dengan selang kepercayaan 95 persen.

Pada hasil survei internal PDIP tanggal 19 Juni 2018 elektabilitas Ganjar-Yasin ada di angka 65,5 persen, kemudian Sudirman-Ida 22,8 persen, dan ada 11,7 persen responden belum memutuskan atau rahasia. Sedangkan pada survei tanggal 20 Juni 2018 elektabilitas Ganjar-Yasin naik menjadi 66,4 persen, sedangkan Sudirman-Ida masih sama 22,8 persen. Responden yang belum memutuskan atau rahasia menjadi 10,8 persen. Bambang Pacul menjelaskan pihaknya juga melakukan simulasi tingkat elektabilitas. Dalam simulasi itu suara pemilih yang belum memutuskan dan rahasia terdistribusi normal.

Hasilnya, Ganjar-Yasin meraih 74,5 persen suara dan Sudirman-Ida 25,5 persen. Dengan tren naiknya elektabilitas dan hasil simulasi itu, menurut Bambang Pacul, merupakan prediksi hasil Pilgub 27 Juni mendatang. "Kalau trennya seperti ini dan tidak ada aksi yang cukup signifikan maka prediksi hasil akhir pilgub kira-kira di angka tersebut," pungkas Bambang. Ia menegaskan hasil survei harian tersebut merupakan early warning system sehingga kekuatan di lapangan bisa langsung diantisipasi.

Realitas yang ditangkap via survey tersebut sangat berbeda dengan realitas pasca pemungutan suara, dimana angka perolehan suara pasangan Sudirman Said dan Ida Fauziah mencapai 41,22 persen. Prosentase itu sekaligus mengonfirmasi hasil jajak pendapat pra pilkada dimana hanya 22 persen saja. Termasuk jajak pendapat yang dilakukan internal PDIP, sebagai partai yang mengukung Ganjar Pranowo.

## ***Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2018***

KPU DKI Jakarta mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi, Minggu (30/4/2017) dini hari. Perolehan suara terbanyak pada putaran kedua Pilkada DKI diraih pasangan calon nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dengan 57,96 persen suara. Adapun pasangan nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat memperoleh 42,04 persen suara. "Kami tanda tangani berita acara tingkat Provinsi DKI Jakarta, kami garis bawahi, perolehan suara paslon dua memperoleh jumlah 2.350.366, sedang paslon nomor tiga memperoleh suara 3.240.987 dengan total suara sah 5.591.353,

Jakarta Pusat, Minggu. Adapun rincian perolehan suara itu, di Kepulauan Seribu, Ahok-Djarot memperoleh suara sebanyak 5.391 (38 persen), sedangkan Anies-Sandi unggul dengan perolehan suara 8.796 (62 persen) dengan total 14.187 suara sah. Di Jakarta Utara, Ahok-Djarot memperoleh suara sebanyak 418.068 (47 persen), sedangkan Anies-Sandi memperoleh 466.340 suara atau 52 persen suara dengan total 884.408 suara sah. Untuk perolehan suara di Jakarta Pusat, Ahok-Djarot memperoleh 243.416 suara atau 42 persen suara, sedangkan Anies-Sandi memperoleh 333.033 suara atau 57 persen suara dengan total 576.449 suara sah. Di Jakarta Barat, Ahok-Djarot memperoleh 611.759 suara atau 47 persen suara, sedangkan Anies-Sandi memperoleh 684.980 suara atau 52 persen suara dengan total 1.296.739 suara sah. (baca: Ini

Aspek yang Disebut Anies Faktor Keunggulannya dalam Pilkada DKI) Di Jakarta Timur, Ahok-Djarot memperoleh 612.093 suara atau 38 persen suara, adapun Anies-Sandi memperoleh 993.174 suara atau 61 persen suara dengan total 1.605.266 suara sah. Di Jakarta Selatan, Ahok-Djarot memperoleh 459.639 suara, sedangkan Anies-Sandi memperoleh 754.665 suara atau 62 persen suara dengan total 1.214.304 suara sah. Adapun ranking partisipasi pemilih tertinggi pertama berada di Kepulauan Seribu dengan persentase pemilih 87 persen, kedua di Jakarta Timur dengan persentase 78 persen, ketiga Jakarta Utara dengan persentase 77 persen, keempat Jakarta Barat dengan persentase 76 persen, kelima di Jakarta Pusat dengan persentase 76 persen, dan keenam di Jakarta Selatan dengan persentase 75 persen warga yang menggunakan hak memilih. "Sehingga, tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan di tingkat Provinsi DKI Jakarta sebanyak 77,08 persen. Dia mengungkapkan, partisipasi pemilih pada putaran kedua menunjukkan peningkatan partisipasi pemilih dibandingkan putaran pertama.

Kasus berbeda dan menarik untuk dipelajari dari perspektif psikologi komunikasi adalah kasus Pilgub DKI Jakarta. Suasana psikologis publik Jakarta terpengaruh dengan beragam "pertunjukan" sebelum digelarnya Pilkada. Didominasi oleh aksi massa yang bernuansa agama dengan aksi kelompok yang mengecam pernyataan Gubernur Ahok yang kemudian disebut sebagai kasus penistaan agama. Aksi penentangan tersebut dilakukan oleh para tokoh agama sehingga memperkuat pandangan publik bahwa apa yang disampaikan oleh Gubernur Ahok benar-benar suatu penistaan agama hingga berujung di Pengadilan.

Publik terbelah. Antara yang berpegang pada pandangan perspektif hukum positif dan hukum agama. Kemudian bermuara pada hasil akhir Pengadilan sebagai dasar legitimasi argumentasi politis. Rangkaian peristiwa tersebut mempengaruhi preferensi pilihan politik publik. Beragam aksi dan "pertunjukan" menjelang Pilgub mempengaruhi sisi emosi publik. Akhirnya, Pilgub DKI Jakarta dimenangkan pasangan Anis Baswedan-Sandiaga Uno yang lagi-lagi awalnya diprediksi lembaga survey tidak akan bisa mengalahkan Ahok.

## ***Quo vadis Metodologis Lembaga Survey***

Makin banyaknya kasus hasil akhir survey yang berbanding terbalik dengan perolehan suara dalam pilkada mendorong menguatnya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga survey. Padahal setiap lembaga survey melakukan proses yang terukur dan ilmiah dalam proses survey. Akhirnya muncul tuduhan bahwa lembaga survey tidak ilmiah, partisan dan "menghalal" segala acara agar angka hasil survey memuaskan pihak yang "membayar" lembaga survey. Akhirnya, beragam hasil survey tidak lagi dipercayai. Terlihat dari makin banyaknya komentar negatif dalam media sosial terhadap hasil survey. Kondisi ini makin menguat menjelang pemilu 2019.

Beragam kasus hasil survey yang meleset di pilkada 2018 mempengaruhi psikologi dan keyakinan publik. Bahwa lembaga survey tidak profesional, memuaskan yang membayar hingga dituding sebagai upaya untuk menggiring opini publik. Kondisi ini menurut penulis terjadi karena beberapa hal, di antaranya:

### ***a. Survey-tainment***

Lembaga survey sebagai lembaga riset yang bekerja secara ilmiah menjelma menjadi lembaga yang berlomba-lomba ingin terkenal dan memaksimalkan publisitas. Hasil survey seakan wajib dipublikasikan meluas oleh semua media. Padahal akan selalu ada resiko dibalik tingginya publisitas media. Sebab akan makin banyak penilaian yang beragam. Padahal seharusnya Lembaga survey menjadi lembaga tink-tank, bukan bagian dari kampanye. Seharusnya bekerja dalam senyap.

### ***b. Tidak Terbuka***

Lembaga survey di Indonesia pada umumnya tidak mendeklarasikan diri bahwa apa yang disurvei apakah independen atau bekerja karena pesanan pihak tertentu. Padahal seharusnya dideklarasikan padahal hal itu tidak akan mengurangi kredibilitas Lembaga survey.

### *c. Vonis Menang-Kalah*

Survey politik yang dilakukan oleh lembaga survey seringkali terburu-buru atau terjebak pada diksi menang-kalah. Padahal hasil survey merupakan gambaran umum dan sebuah prediksi dari probabilitas yang masih akan terus berubah.

## KESIMPULAN

Berkaca pada situasi pilkada 2018 yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada hal yang tidak cukup bisa diukur oleh metode survey yaitu faktor emosi publik. Dalam komunikasi massa, factor emosional atau psikologis menjadi salahsatu hambatan dalam komunikasi massa. Sehingga pesan yang disampaikan tidak efektif atau dapat mempengaruhi pereferensi politik.

Dalam beberapa kasus di pilkada 2018, faktor emosi publik secara efektif dapat berubah drastis melalui pendekatan agama seperti yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta dan pengaruh tersebut berupaya dibawa ke Pilgub Jabar. Isu partai penista agama, pendukung penista agama dan gerakan 212 mempengaruhi psikologi publik yang sangat dominan. Hal ini mendorong terbentuknya silent majority. Mereka merasakan sesuatu yang dipendam tapi tidak terungkapkan. Proses pemilu dimaknai sebagai bagian dari momen menunjukkan identitas diri umat beragama. Demikian sentiment publik dibangun.

Faktor lainnya yang mempengaruhi psikologi atau emosi publik sehingga menimbulkan pergeseran terhadap pereferensi politik adalah faktor moral dan etika. Isu korupsi yang menerpa Ganjar Pranowo menjelang Pilgub Jateng berpengaruh pada preferensi politik masyarakat. Sehingga Sudirman Said dipandang sebagai sosok yang bersih dari isu korupsi. Dengan demikian dapat disimpulkan, hal yang dinamis dapat terus berubah dan sulit untuk diukur yakni faktor emosi publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Elms, A.C. 2000. *Personality in psychology*, San Diego New York : Harcourt Brace Jovanovich Publisher.
- Erisen, E. 2012. *An Introduction to political psychology for international relation scholars*, Perceptions, Vol.XVII, No : 3, p.9-28.
- Effendi, Onong U. 2003. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Hall, Stuart et.al (ed). 2011. *Budaya Media Bahasa: Teks Utama Pencanang Cultural Studies 1972-1979*. Penerjemah: Saleh Rahmana. Bandung & Yogyakarta:Jalasutra.
- Harimukti, Kridalaksana. 2001. *Kamus Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jhon, Fiske. 1990. *Cultural and Communication Studies: Sebuah Pengantar Paling Konprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Dennis McQuail. 1987. *Teori komunikasi massa : Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga. 2011. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salmemba Humanika.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, eddy. 2001 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakary
- Spradley, james P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT tiara Wacana.
- Syam, Nina W. 2012. *Psikologi Sosial: Sebagai Akar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.



